

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Guru

1. Pengertian Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab mengajar, mendidik, membimbing, menyediakan sarana belajar, dan tugas guru adalah mengawasi serta membentuk peserta didik dalam proses pembelajaran.

Menurut (Mustafa Setya, 2024). Guru adalah profesi atau jabatan yang membutuhkan keahlian tertentu. Profesi ini tidak dapat dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Memiliki keahlian berbicara dalam bidang tertentu belum tentu membuat seseorang menjadi guru. Untuk menjadi guru, dibutuhkan kriteria khusus, terlebih lagi untuk menjadi guru profesional yang harus menguasai berbagai aspek pendidikan dan pengajaran serta berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang perlu dibina dan dikembangkan melalui periode pendidikan tertentu.

Menurut Sabri dalam (Sanjani, 2020) Guru memainkan peran kunci dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan serangkaian tindakan antara guru dan siswa, atau dasar dari hubungan timbal balik yang terjadi dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan.

Menurut (Nanda Dkk, 2022). Guru PKn bertanggung jawab untuk menanamkan perilaku yang bermanfaat bagi pengembangan karakter siswa. Oleh karena itu, peran pendidik dalam pembelajaran harus dijalankan secara efektif dan profesional. Peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan pembelajaran tetapi juga mendorong siswa untuk belajar karena proses pendidikan dan pembelajaran menuntut siswa untuk secara sadar mengembangkan informasi, pola pikir, dan kemampuan.

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat simpulkan guru adalah pendidik profesional yang memainkan peran sentral dalam proses pendidikan, tidak hanya mengajar dan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Guru bertanggung jawab menciptakan proses pembelajaran yang efektif melalui interaksi timbal balik dengan siswa, menyediakan sumber belajar yang suportif, dan berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku siswa secara sadar dan berkelanjutan. Peran guru harus dijalankan secara profesional untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik.

2. Kompetensi Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 tentang Guru dan Dosen, “ Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Menurut (Mustafa Setya, 2024). Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik adalah keterampilan fundamental yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran siswa. Dalam konteks ini, guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa, cara merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta bagaimana mengevaluasi hasil belajar dan mengembangkan potensi siswa. Kompetensi ini sangat penting karena guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kompetensi pedagogik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. guru memiliki kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran, mulai dari merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi tersebut memungkinkan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif serta memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan keterbatasan sarana yang tersedia sehingga proses pembelajaran tetap berjalan secara efektif.

2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang terkait dengan perilaku pribadi seorang guru, yang idealnya mencerminkan nilai-nilai tinggi dan tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka. Ini erat kaitannya dengan filosofi hidup yang memandu seorang guru untuk menjadi contoh manusia yang berpegang pada nilai-nilai mulia. Di Indonesia, sikap pribadi yang dimotivasi oleh filosofi Pancasila, yang menghargai budaya bangsa dan bersedia berkorban untuk keberlanjutan bangsa dan negara, termasuk dalam kompetensi kepribadian seorang guru.
3. Kompetensi sosial adalah salah satu daya atau kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta

kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Karakteristik kompetensi sosial guru yang perlu dimiliki sebagai berikut:

1. Adaptasi terhadap lingkungan.
 2. Empati dan berkomunikasi dengan sopan.
 3. Bergaul secara efektif.
 4. Memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia.
4. Kompetensi profesionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan dan otoritas guru dalam menjalankan tugas dan peran mereka dalam profesi pendidikan. Guru yang mahir dalam melaksanakan tugas profesional mereka dapat dianggap sebagai guru yang kompeten dan profesional. Indikator kompetensi profesional guru dalam penguasaan materi pelajaran sebagai berikut:
1. Memahami materi ajar yang termuat dalam kurikulum sekolah.
 2. Memahami struktur, konsep, dan metode yang relevan dengan materi ajar.
 3. Mampu menerapkan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Memahami hubungan antar konsep-konsep dalam pelajaran yang terkait.

3. Karakteristik Guru

Menurut (Munawir, Dkk. 2023). Karakteristik guru adalah sifat-sifat khas, akhlak baik yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat menjadi suri tauladan bagi anak didiknya, juga memiliki rasa cinta kasih dan tulus ikhlas dalam proses kegiatan belajar mengajar agar anak didik memiliki semangat dan motivasi yang tinggi sehingga akan timbul sikap aktif, kreatif, dan inovatif. Menurut Syarifah dalam (Munawir, Dkk. 2023). Berikut ini adalah macam-macam karakteristik dari guru profesional diantaranya yaitu:

1. Taat pada peraturan perundang-undangan, pemerintah memegang kebijakan pendidikan yang ada di Negara Indonesia.
2. Taat pada pemimpin, seorang guru harus taat kepada pemimpinnya, tingkatan kepemimpinan dimulai dari kepengurusan cabang daerah hingga pusat, hal ini juga berlaku sama untuk dinas pendidikan.
3. Membimbing peserta didik, guru memiliki peran membimbing, menjaga, dan mengarahkan peserta didik supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, serta sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut.
4. Memelihara hubungan dengan teman sejawat di dalam butir ketujuh pada kode etik guru dijelaskan bahwa “Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial”.
5. Menciptakan suasana baik di tempat kerja, Suasana baik yang tercipta di tempat kerja tentu akan meningkatkan produktivitas guru.

Menurut (Gunawan & Imam, 2023) karakteristik yang harus dimiliki oleh guru profesional antara lain sebagai berikut :

1. Sehat Jasmani dan Rohani dalam menjalankan tugas pengajaran, kondisi fisik serta mental yang memungkinkan dapat membuat seorang guru lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik.
2. Menguasai kurikulum artinya seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hendaknya mengacu pada kurikulum yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Menguasai materi yang diajarkan artinya dalam pembelajaran, penguasaan materi seorang pendidik sangat berpengaruh pada penyampaian informasi kepada peserta didik.

4. Terampil menggunakan berbagai metode pembelajaran karena metode pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik.
5. Berperilaku yang baik merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena, dengan adanya moral (perilaku baik) pendidik mampu mengontrol kelakuan atau sikap saat mengajar sehingga tidak adanya perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar.

4. Peran Guru PKn

Sebagai Guru Kewarganegaraan, pembentukan karakter tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila dapat dijadikan sarana pengembangan karakter bagi siswa, karena Pancasila memuat nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Siswa pada hakikatnya adalah warga negara Indonesia. (Karina Cahayani, 2021)

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tugas dan peran yang lebih banyak dibandingkan guru mata pelajaran lainnya, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab untuk membentuk perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada tetapi juga mentransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, dihayati, dan diwujudkan dalam perilaku baik siswa. Oleh karena itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu memanfaatkan fungsinya sebagai pembimbing moral, pembina sikap, serta pemberian arahan bagi siswa. (Sama' & Aini, 2022)

Menurut (Nanda et al., 2022) Peran guru PKN sangatlah penting, selain mendidik guru PKn juga membentuk sikap kepribadian siswa agar menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap hukum, bersikap jujur, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Peranan seorang guru PKn bukanlah sekedar upaya memindahkan pemikiran bagaimana menjadi warga yang baik kepada siswa, tetapi berperan memberikan motivasi, menumbuhkan semangat belajar, menanamkan pola berpikir serta membina sikap serta perilaku siswa agar sesuai dengan aturan. Pengetahuan dan pengenalan suatu nilai dan contoh-contoh sikap perilaku atau perbuatan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan perkembangan siswa. Contoh-contoh sikap dan perilaku yang positif yang dapat guru berikan misalnya menaati tata tertib baik disekolah, keluarga maupun dimasyarakat, hidup rukun dalam perbedaan dan menghormati guru dan menjauhi contoh yang bersifat negatif.

Menurut (Yestiani & Zahwa, 2020). Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Tak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran.:

1. Peran guru sebagai pendidik

Peran guru sebagai pendidik merupakan peran guru sebagai panutan dan sumber jati diri bagi peserta didik serta lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memenuhi standar dan kualitas tertentu yaitu sebagai seorang pendidik, guru perlu memiliki rasa tanggung jawab, dan disiplin yang baik.

2. Peran Guru sebagai pembimbing

Peran guru sebagai pembimbing adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa serta orang tua, meskipun guru tidak memiliki pelatihan khusus sebagai pembimbing profesional. Siswa sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan dalam kehidupannya sehingga membutuhkan bantuan dan arahan dan nasihat dari guru. Oleh karena itu, untuk memahami perannya sebagai pembimbing dan tempat siswa untuk berkonsultasi, guru perlu memahami psikologi kepribadian siswa.

3. Peran guru sebagai motivator

Motivator adalah seseorang yang memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain. Guru berperan sebagai motivator karena kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi serta dorongan semangat dalam diri siswa agar mereka lebih bersemangat dalam belajar.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa peran guru memiliki peran penting dalam membentuk watak kewarganegaraan siswa melalui beberapa peran utama, yaitu peran sebagai pendidik, pembimbing, dan motivator.

Sebagai pendidik, guru berperan sebagai panutan serta sumber jati diri bagi siswa. Sebagai panutan, guru memberikan keteladanan melalui sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Keteladanan tersebut dapat terlihat dari perilaku guru yang datang tepat waktu ke sekolah, mematuhi aturan yang berlaku, serta menunjukkan sikap yang baik kepada siswa. Selain itu, guru juga berperan sebagai sumber jati diri bagi siswa melalui sikap dan

kepribadian yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, seperti bersikap sopan santun melalui kebiasaan memberi salam, senyum, dan sapaan kepada siswa. Melalui sikap tersebut, siswa dapat mencontoh dan membentuk karakter yang baik

Sebagai pembimbing, guru memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa ketika siswa melakukan pelanggaran. Bimbingan tersebut dapat berupa menegur siswa yang bolos, memberikan nasihat kepada siswa agar lebih peduli kepada teman yang kesusahan, bolos sekolah, serta membimbing siswa agar tidak mengulangi pelanggaran seperti berbicara kasar dan tidak menghargai pendapat teman.

Sedangkan sebagai motivator, guru memberikan dorongan dan semangat kepada siswa agar lebih disiplin dalam belajar dan berperilaku di sekolah. Motivasi tersebut dapat diberikan dengan memberikan semangat kepada siswa agar lebih bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan, serta mendorong siswa untuk menjalankan kewajibannya sehingga dapat membentuk sikap disiplin.

B. Konsep *Civic Disposition*

1. Pengertian *Civic Disposition*

Menurut (Sama' & Aini, 2022). *Civic Disposition* atau watak kewarganegaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokratis.

Menurut (Zalmi & Montessori, 2023) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) adalah Merujuk pada Karakter privat dan publik. Karakter

publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, menaati aturan, berfikir kritis, dan berkompromi. Sedangkan karakter privat meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri menghargai hak individu. Kemudian, proses pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang diteliti meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang dimuat dalam rencana program pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Menurut Fitriyani&Muthali'in (2023) *Civic disposition* atau watak kewarganegaraan dapat diartikan sebagai watak kewarganegaraan bertujuan untuk membangun dan membentuk karakter warga negara agar memiliki karakter yang baik. Sedangkan Menurut (Tutuarima Frincean, 2022). *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan karena dalam pembelajaran ini tidak hanya mengajarkan siswa untuk bersikap demokratis, kritis dan politis tetapi juga perlu membentuk karakter warga negara yang ideal.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan *Civic disposition* atau watak kewarganegaraan merupakan aspek krusial dalam pendidikan kewarganegaraan, yang mencakup karakter publik dan privat. Karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan terhadap sesama, berfikir kritis, dan berkompromi. Sedangkan karakter privat meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri dan menghargai hak individu. Dalam penelitian ini fokus dibatasi pada lima indikator yang muncul secara nyata dilapangan yaitu, disiplin, tanggung jawab kesopanan, menghargai hak individu, dan kepedulian terhadap sesama. Aspek

berpikir kritis dan kemampuan berkompromi tidak menjadi fokus karena tidak teridentifikasi dalam data pelanggaran siswa.

Menurut (Mulyono, 2022). Tujuan utama dari *civic disposition* adalah mengembangkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia setiap individu, maupun karakter publik seperti kepedulian sebagai warga negara, sopan santun, penghargaan terhadap hukum (*rule of law*), berpikir kritis, serta kemauan mendengar, berunding, dan berkompromi.

Civic Disposition sesungguhnya sangatlah diperlukan untuk menumbuhkan tanggung jawab. Berdasarkan *civic disposition* di sekolah melalui pembelajaran Pkn akan dapat meningkatkan *civic disposition* pada peserta didik. Meningkatkan *civic disposition* seperti mencintai tanah air seperti saling menghormati, adanya rasa peduli terhadap kesusahan yang dihadapi teman untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Pembentukan *civic disposition* dengan cara guru membimbing merupakan peran guru dalam pembentukan *civic disposition*, karena dengan adanya rasa peduli terhadap peserta didik, berarti mempunyai rasa hak dan kewajiban yang sama terhadap peserta didik untuk saling membantu. Berkaitan dengan mengimplementasikan *civic disposition*. Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti disiplin diri, tanggung jawab, moral dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kompromi. (Yuliana, 2025)

2. Karakteristik *Civic Disposition*

Menurut (Sama' & Aini, 2022). Secara konseptual, *civic disposition* atau watak kewarganegaraan meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni sebagai berikut:

1. *Civility (respect and civil discourse)* atau kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi.
2. *Individual responsibility* atau tanggung jawab individu.
3. *Self-discipline* atau disiplin.
4. *Civic-mindedness* atau kepedulian terhadap Masyarakat.
5. *Toleration of diversity* atau menghargai perbedaan.
6. *Patience and persistence* atau kesabaran dan kegigihan
7. *Open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity)* atau keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan.
8. *Compromise (conflict of principles)* atau sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip dan batas-batas kompromi.
9. *Compassion* atau toleransi pada keragaman.
10. *Generosity* atau kedermawanan
11. *Loyalty to the nation and the principles* atau kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsi-prinsipnya.

3. Indikator *Civic Disposition*

Menurut (Latipa Dkk. 2022). *Civic disposition* atau watak kewarganegaraan peserta didik sudah sangat baik walaupun masih ada beberapa watak

kewarganegaraan yang masih belum muncul dan perlu bimbingan dari guru maupun orang tua di rumah. Indikator *civic disposition* pada peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Sikap disiplin Peserta Didik
2. Rasa tanggung jawab peserta didik
3. Menghargai pendapat setiap individu.
4. Kesopanan.
5. Peduli terhadap sesama.

Menurut (Yuliana, 2025). *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) mencakup berbagai aspek yang mendefinisikan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan Aktif: Mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan politik, sosial, dan kemasyarakatan yang mendukung proses demokrasi dan kehidupan sosial. Ini termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, pertemuan masyarakat, dan kegiatan yang memajukan kepentingan publik.
2. Tanggung Jawab Sosial: Mengajarkan siswa untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mengembangkan komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab.
3. Kepatuhan Hukum: Membantu siswa memahami dan menghargai aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat, serta pentingnya mematuhi norma dan aturan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan

4. Empati dan Kepedulian: Mengembangkan kemampuan siswa untuk merasakan dan memahami kebutuhan dan permasalahan orang lain, serta berupaya membantu dan mendukung mereka dalam konteks sosial.

4. Pendekatan *Civic Disposition*

Menurut (Pangalila, 2020) Pendekatan *civic disposition* adalah pendekatan dalam pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada pembentukan nilai dan sikap kewarganegaraan dalam upaya pembinaan warga negara yang cerdas dapat dilakukan melalui 3 pendekatan berikut ini:

1. Pengembangan Psikopedagogis (*Psychopaedagogical development*)

Psychopaedagogic development adalah proses penanaman nilai kewarganegaraan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan disengaja melalui kegiatan pembelajaran di sekolah dengan dukungan metode dan media yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Oleh karena itu, keterbatasan metode dan media pembelajaran dapat menghambat proses tersebut dalam membentuk *civic disposition* siswa.

2. Pengembangan Psikopedagogis (*Sociocultural Development*)

Sociocultural Development adalah pendekatan yang berpandangan bahwa pembentukan sikap kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Lingkungan ini berperan penting dalam memperkuat atau bahkan melemahkan nilai-nilai yang telah ditanamkan di sekolah. Apabila lingkungan sosial dan budaya tidak memberikan dukungan yang baik dan tidak sejalan dengan nilai yang diajarkan di sekolah, maka proses pembentukan *civic disposition* akan menjadi kurang optimal

3. Intervensi Sosial-Politik(*Sociopolitical intervention*)

Sociopolitical Intervention merupakan pendekatan yang menekankan bahwa penanaman nilai-nilai kewarganegaraan dapat dilakukan melalui dukungan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh sekolah maupun pemerintah. Aturan sekolah, program resmi, serta kebijakan pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membantu proses internalisasi pada peserta didik. Negara atau sekolah tidak mendominasi, tetapi menyediakan berbagai kebijakan, pedoman dan kegiatan yang memungkinkan siswa belajar serta membiasakan diri dengan nilai-nilai *civic disposition*.

5. Model Pembelajaran *Civic Disposition*

Menurut (Tabrani, 2024). Model Pembelajaran merupakan gabungan kata (frasa) yang tersusun dari dua kata, yaitu model dan pembelajaran. Model dalam kamus bahasa indonesia, adalah kata benda (nomina) yang memiliki pandangan kata pola contoh, acuan, ragam. Sedangkan pembelajaran berakar kata ajar (nomina) yang dalam bentuk kata kerja (kerja) menjadi kata belajar. Selanjutnya, imbuhan pean pada kata pembelajaran membawa kepada pengertian proses. Dalam bahasa inggris, belajar sebagai aktivitas dan pembelajaran sebagai proses sama-sama menggunakan kata learning. Dengan demikian, pembelajaran dapat diartikan dengan proses belajar.

Menurut (Asrini, 2021) Model pembelajaran merupakan suatu pola yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran sehingga guru dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan

suatu informasi, ide, pengetahuan, keterampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide.

Menurut (Taupik & Fitriani, 2021) Model pembelajaran adalah kegiatan yang sengaja dirancang guna menunjang proses pembelajaran antar pendidik dan peserta didik. Dengan kata lain dengan adanya model pembelajaran ini memudahkan pendidik dalam mengajar peserta didiknya. Model pembelajaran ini juga diaplikasikan untuk menyusun kurikulum, mengaplikasikan bahan ajar, dan membimbing pendidik di kelas.

Dari pendapat di atas dapat peneliti simpulkan model pembelajaran adalah pola atau desain sistematis yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru mengelola pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir secara efektif. Berikut model pembelajaran *civic disposition* :

1. Model Pembelajaran *Project Citizen*

Model Pembelajaran *Project Citizen* merupakan sebuah model pembelajaran dari amerika, kemudian diterapkan di indonesia dengan menyesuaikan keadaan pendidikan di Indonesia. *Project citizen* dapat diartikan sebagai wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai adjective. Sebagai wujud benda fisik, *project citizen* adalah sebuah kumpulan pekerjaan siswa yang bermanfaat, terintegrasi yang diseleksi dan disimpan dalam suatu bundle. Model pembelajaran ini memerlukan kerja keras yang tidak sedikit, karena diperlukan kerja sama yang baik dalam sebuah tim. (Lukitoaji, 2021)

Menurut (Susilo, 2022) Model pembelajaran *project citizen* merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk menguatkan *civic disposition*. *Project citizen* ini membina pembelajaran yang multi M3SE (materi, media, metode, sumber dan evaluasi) karena didalamnya mencakup berbagai ragam jenis kegiatan, media dan sumber serta pola evaluasinya diperuntukan untuk suatu tema/bahasan yang sama atau sejenis.

2. Model pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT)

Model Pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT) merupakan suatu model pembelajaran dengan teknik yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam menemukan, mencari, dan menentukan nilai-nilai yang melatar belakangi sikap, tingkah laku, perbuatan serta pilihan-pilihan yang dibuatnya dalam menghadapi suatu persoalan. VCT menekankan bagaimana sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurut anggapannya baik, yang pada gilirannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. (Aryanti, 2022)

Model Pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT) digunakan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial dan mengajarkan “*ethical relativism*” Implementasi model akan berpengaruh terhadap tumbuhnya kesadaran toleransi dalam menyikapi perbedaan. Proses klarifikasi nilai akan menjadikan semangat “*equal in creation*” (sederajat dalam penciptaan) dan common goal untuk kesejahteraan bersama sebagai *core values*. (Muhibbin, 2020)

3. Model pembelajaran berbasis isu kontroversial

Model pembelajaran berbasis isu kontroversial mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penanaman *civic disposition* siswa. Model ini mampu menumbuhkan partisipasi siswa yang lebih dinamis selama proses belajar mengajar berlangsung, menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warganegara, serta mendorong keterlibatan siswa dalam diskusi yang bersifat reflektif dan kritis. Selain itu, model ini juga menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan, serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Perubahan perilaku siswa tercermin dari meningkatnya kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, sikap proaktif dalam diskusi kelas, serta kemampuan menunjukkan sikap kritis dan toleran terhadap perbedaan pandangan. (Susanti & Widodo, 2025)

6. Hambatan Guru PKn dalam Menanamkan *Civic Disposition*

Menurut (Sembiring, 2024). Beberapa faktor hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *civic disposition* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kurangnya Dukungan Dari Orang Tua.

Faktor kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam tujuan pendidikan yang diharapkan. Ketika orang tua tidak terlibat dalam proses pendidikan atau tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh siswa. Mereka mungkin merasa kurang diperhatikan atau tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Situasi ini dapat

mengakibatkan hilangnya motivasi siswa. Tanpa dukungan dari orang tua, siswa mungkin merasa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah tidak penting atau tidak dihargai, serta mengurangi rasa tanggung jawab mereka terhadap pembelajaran

2. Faktor Keterbatasan Sumber Daya

Faktor keterbatasan sumber daya. Meskipun guru berusaha menciptakan pengajaran yang inovatif, keterbatasan metode, media pembelajaran di sekolah dapat menghambat proses belajar. Misalnya, jika tidak ada akses ke teknologi modern, penggunaan media visual atau alat peraga yang dapat memperkaya pembelajaran menjadi sangat terbatas.

3. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Faktor lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan sikap siswa. kondisi keluarga serta perbedaan nilai yang diterima siswa di lingkungan rumah maupun pergaulan dapat mempengaruhi pembentukan sikap kewarganegaraan dan tanggung jawab siswa, kondisi tersebut menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mempertahankan sikap positif secara konsisten.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menanamkan *civic disposition*, yaitu kurangnya dukungan orang tua, keterbatasan sumber daya, serta lingkungan sosial dan budaya siswa.

Kurangnya dukungan dari orang tua, seperti minimnya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua menyebabkan rendahnya keterlibatan orang tua

dalam mendukung kegiatan dan pembentukan *civic disposition*, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tanggung jawab siswa di sekolah.

Keterbatasan sumber daya seperti masih kurangnya metode pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang masih sangat terbatas di sekolah turut menghambat proses pembelajaran, sehingga berdampak pada kurang optimalnya partisipasi dan tanggung jawab siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Lingkungan sosial dan budaya siswa juga mempengaruhi pembentukan sikap siswa. Kondisi lingkungan keluarga dan pergaulan siswa dapat membentuk perilaku yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, sehingga mempengaruhi sikap siswa dalam kehidupan di sekolah.

7. Upaya Mengatasi Hambatan Guru PKn dalam Menanamkan *Civic Disposition*

Menurut (Febiola Puja, 2024) Upaya guru Pkn dalam mengatasi hambatan *civic disposition* dapat dilakukan dengan berbagai upaya, berikut ini upaya yang dapat dilakukan guru yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai Model Keteladanan

Guru sebagai model keteladanan bagi peserta didik harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan contoh dalam seluruh kehidupannya. Guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra guru yang baik dan kewibawaannya. (Salsabilah Dkk, 2021)

Dalam pembentukan *civic disposition* pada peserta didik pemberian contoh dan teladan adalah strategi yang paling efektif dan sangat penting. Contoh yang

diberikan mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan, perilaku dan sikap yang baik, seperti kejujuran, toleransi, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, rasa hormat terhadap keberagaman serta rasa tanggung jawab, bukan hanya guru tetapi tokoh tokoh masyarakat yang menjadi panutan dapat memberikan contoh yang positif bagi peserta didik. (Febiola Puja, 2024)

2. Pembelajaran aktif

Pembelajaran aktif yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kewarganegaraan pada peserta didik dengan salah satu caranya adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik dengan melibatkan mereka dalam diskusi, debat atau proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi makna dan aplikasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan juga mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan di komunitasnya, serta memberikan contoh nyata bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun diluar sekolah

3. Kerja sama sekolah, orang tua, dan lingkungan

Kerja sama sekolah, orang tua, dan lingkungan dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik yang baik, kerja sama antara sekolah dan orang tua sangatlah penting. Orang tua dapat menjadi pendukung dalam pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan bagi peserta didik di rumah, dengan memberikan contoh atau teladan yang baik. Komunikasi antara orang tua dan guru juga diperlukan untuk memantau perkembangan peserta didik. Kerja sama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang

mendukung pertumbuhan dan pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh.

Menurut (Listari, 2022) orang tua memiliki peranan penting dalam mendukung guru dalam pembinaan kedisiplinan siswa melalui pemantauan aktivitas dan pembentukan karakter siswa di rumah, kehadiran dalam pertemuan sekolah, serta pelaksanaan komitmen yang telah disepakati bersama dalam proses pembinaan peserta didik.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa upaya mengatasi hambatan dalam menanamkan *civic disposition*, yaitu dengan model keteladanan, pembelajaran aktif, kerja sama sekolah, dan lingkungan.

Model keteladanan guru memiliki peran penting dalam menanamkan *civic disposition* kepada peserta didik, karena sikap, perilaku, dan kepribadian guru yang baik dapat menjadi contoh bagi siswa dalam membentuk nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat terhadap keberagaman.

Pembelajaran aktif dapat membantu peserta didik memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi, debat, proyek, dan kegiatan sosial, siswa dapat lebih aktif dalam mengembangkan sikap tanggung jawab, kerja sama.

kerja sama antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sangat penting dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik. Orang tua berperan dalam memberikan teladan, pemantauan aktivitas, dan pembinaan karakter, sedangkan

komunikasi yang baik dengan pihak sekolah dapat membantu perkembangan sikap dan kedisiplinan peserta didik.

C. Konsep Pembelajaran Pkn

1. Pengertian PKN

Menurut (Munthe Dkk, 2023). Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut (Magdalena Dkk, 2020). Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban sebagai warga negara agar segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Karena pentingnya hal tersebut, pendidikan ini telah dilaksanakan sejak usia dini pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang kompeten dan siap hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) berfungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya, berkomitmen untuk setia kepada bangsa dan negara Indonesia, serta merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Menurut (Pangalila, 2020) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang mengemban misi membentuk kepribadian bangsa, yaitu sebagai upaya sadar dalam "nation and character building". Dalam konteks ini, peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam keberlanjutan bangsa dan negara sangatlah strategis.

Menurut (Telaumbanua, 2021) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi multidisiplin. Secara lebih rinci, materi pengetahuan kewarganegaraan mencakup pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, jati diri bangsa, pemerintahan berdasarkan (rule of law) hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai dan norma dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan yang berfungsi menanamkan nilai-nilai moral dan budaya bangsa, membentuk karakter serta kepribadian peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan Pembelajaran PKn

Menurut (Munthe Dkk, 2023). Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah agar peserta didik mampu:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan

2. Berpartisipasi secara bermutu, bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (Magdalena Dkk, 2020).

D. Konsep Pendidikan Karakter

Menurut (Yuyun yunita, 2021). Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai *“the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”*. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan.

Menurut (Neni Triana, 2021). Pendidikan karakter itu merupakan proses pendidikan yang sengaja dirancang untuk membentuk, memperbaiki karakter peserta didik/siswa, mengembangkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan

sehari-hari dengan tulus tanpa paksaan. Proses pendidikan tersebut dapat dilakukan secara integral dalam mata pelajaran di sekolah atau madrasah.

Menurut (Rinja Efendi, 2020). Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mempunyai proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi). Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan.

Menurut (Rinja Efendi, 2020). Tujuan pendidikan karakter yaitu untuk membentuk bangsa yang tangguh, bangsa yang bermoral, berakhlak mulia, bertoransi serta bekerja atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter juga bertujuan untuk membentuk suatu bangsa agar memiliki jiwa yang patriotik atau jiwa suka menolong antar sesama. Selain itu, pendidikan karakter juga untuk membentuk jiwa seseorang agar berkembang secara dinamis, berorientasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Menurut (Nur Agus Salim, 2022). Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan karakter kepada peserta didik sehingga peserta didik mempunyai sikap peduli, jujur, tanggung jawab, rajin dan menghargai sesama. Guru dapat memberikan contoh sehingga menjadi teladan untuk peserta didik, bagaimana guru menyampaikan materi, cara berbicara dan bagaimana guru menunjukkan rasa toleransi.

Pendidikan karakter yang menyatakan bahwa orang tua merupakan lembaga pendidikan pertama bagi peserta didik sehingga pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh perhatian, bimbingan, dan pengawasan orang tua. Kurangnya peran orang tua dalam pendidikan karakter dapat mempengaruhi perkembangan sikap dan perilaku peserta didik. (Pratwi, 2023)

Pendidikan karakter merupakan upaya dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus di lingkungan sekolah sehingga menjadi kebiasaan bagi siswa. Melalui pembiasaan tersebut, siswa dapat dibimbing untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan perilaku positif. (Ayni et al., 2022)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai moral, sikap, dan perilaku baik kepada peserta didik melalui pembelajaran, keteladanan, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter bertujuan membentuk peserta didik yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, toleran, peduli terhadap sesama, dan berakhlak mulia. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter memerlukan peran guru sebagai teladan, dukungan orang tua, serta lingkungan sekolah yang mendukung agar pembentukan karakter peserta didik dapat berkembang secara optimal.

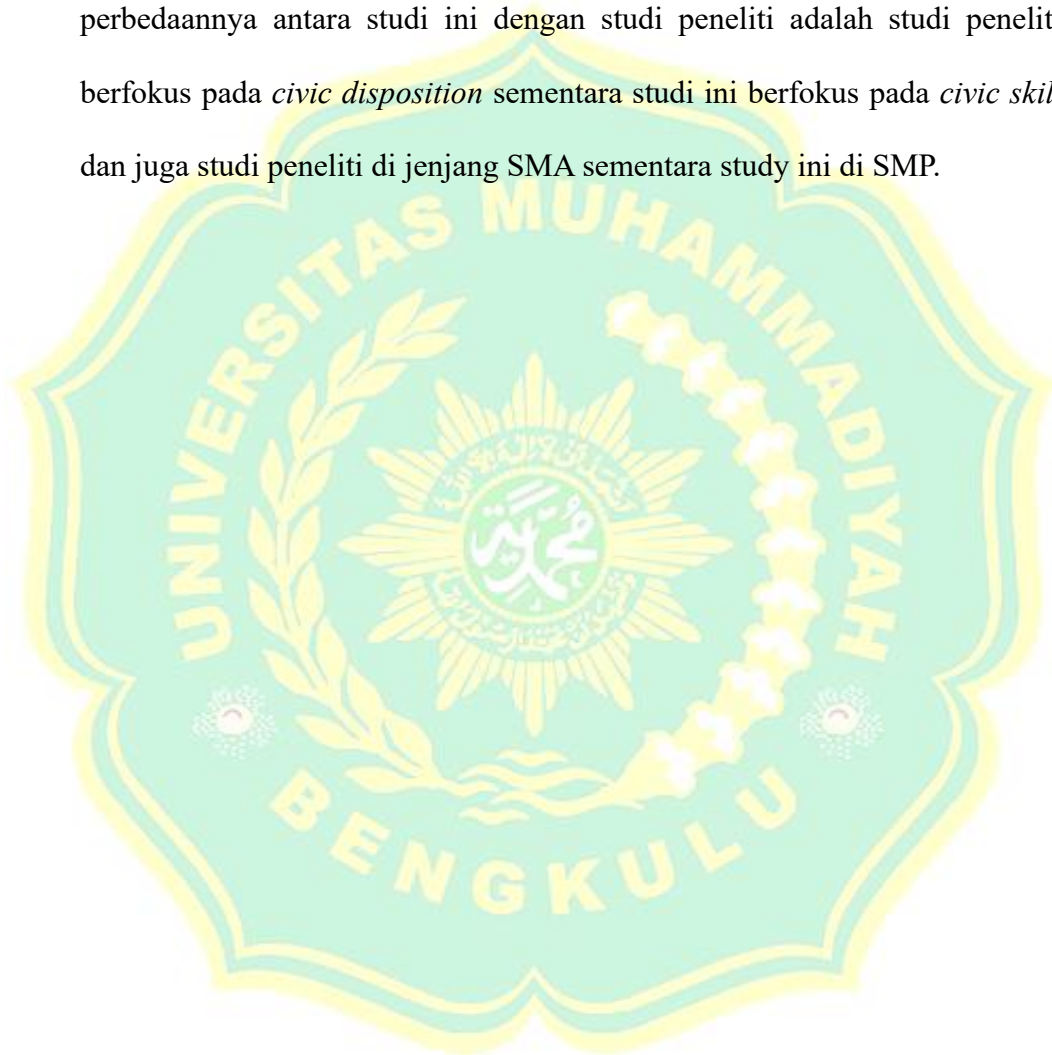
E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yeti Novita Sari pada tahun 2020 berjudul "Peran Guru PKn dalam menanamkan *Civic Virtue* Peserta Didik Di SMA

YP Unila Bandar Lampung ”Hasil persentase yang kuat, yaitu 0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru PKn dalam menanamkan *Civic Virtue* pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung sangat kuat dan dapat dianggap instrumental. Perbedaan antara studi ini dan studi penulis adalah studi penulis hanya ditujukan untuk meningkatkan *civic disposition*, sementara studi ini berfokus pada penanaman *civic virtue*. Persamaan antara studi ini dan studi penulis adalah keduanya mengkaji peran guru PKn.

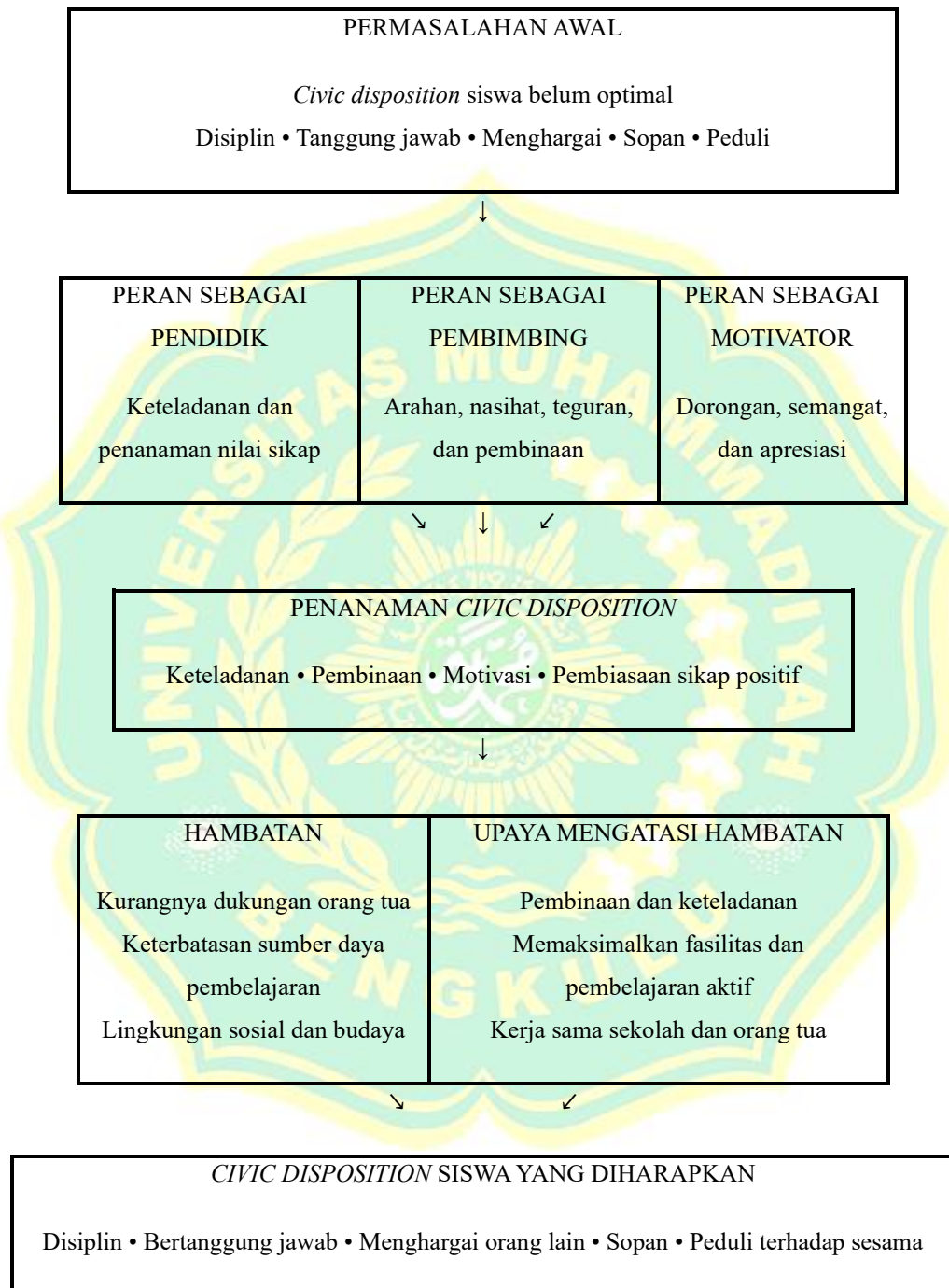
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Setiawan dkk pada tahun 2024 dengan judul “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Motivator dalam Meningkatkan *Civic Disposition* Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Rawamerta” memiliki kesamaan dalam membahas tentang peran guru PKn terhadap *civic disposition* siswa kelas XI jenjang SMA, sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, namun terdapat perbedaan fokus jika penelitian terdahulu menekankan peran guru sebagai motivator, maka penelitian ini mengkaji peran guru secara umum seperti peran sebagai pendidik, pembimbing, motivator.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Talita Sembiring pada tahun 2024 dengan judul “Strategi Inovatif Guru Pkn Dalam Meningkatkan *Civic Diposition* Siswa Di SMP Perintis Sejahtera Medan” Memiliki persamaan karena sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, Perbedaan antara studi ini dengan studi penulis adalah studi peneliti berfokus pada peran guru PKn dalam menanamkan *civic disposition*, sementara studi peneliti ini berfokus pada strategi inovatif guru

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agnesia Hartini dan Simon Petros pada tahun 2020 dengan judul “Peran Guru Pkn Dalam Membina *Civic Skill* siswa sekolah menengah pertama negeri 7 Tempunak ”memiliki persamaan dengan peneliti karena sama-sama membahas peran guru PKn dan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya antara studi ini dengan studi peneliti adalah studi peneliti berfokus pada *civic disposition* sementara studi ini berfokus pada *civic skill* dan juga studi peneliti di jenjang SMA sementara study ini di SMP.



F. Kerangka Berpikir

Bagan/ Struktur Kerangka Berpikir



Menurut (Bashori & Aulia, 2024) Kerangka berpikir merupakan landasan pemikiran logis dalam penelitian yang anggapannya dasarnya dapat diterima oleh peneliti. Kerangka berpikir ini menjadi pedoman dan fondasi dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Penting bagi peneliti untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual yang kuat sebelum memulai penelitian mereka. kerangka berpikir ini akan membantu memahami masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan garis besar alur yang akan terjadi saat berjalannya sebuah penelitian, berfungsi sebagai pedoman dan fondasi untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini masalah awal yaitu kurangnya *civic disposition* yang dimiliki oleh siswa. Dari sini peneliti akan melihat peran guru untuk mengatasi masalah yang ada.

Guru PKn berperan penting dalam mengembangkan karakter warga negara yang baik agar menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia serta menjadi penjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Akan tetapi kurangnya penanaman *civic disposition* masih memicu terjadinya pelanggaran aturan yang terjadi di sekolah dengan begitu perlunya peningkatan peran guru PKn menanamkan *civic disposition* pada siswa kelas XI di SMA Negeri 4 Kaur Tahun 2026.